ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Kebijakan Pendidikan: Kurikulum Pendidikan Nasional Era Soekarno sebagai Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia 1945–1966

Della Winka Septia[1]*, Siti Fatimah[2]
[1,2] Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
*dellawinkas@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on the curriculum as a tool for national character building. This research explores educational policies during the Sukarno administration in 1945–1966. This aims to trace the development of the policy curriculum during that period, understand the ideological foundations that underlie it, and analyze the role of the curriculum in shaping the character and identity of the Indonesian nation after independence. This research uses a historical approach with a qualitative approach through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results show that during the Sukarno administration, the educational curriculum was aimed at developing a sense of nationalism, patriotism, and national personality in line with the state ideology. Education was not merely conveying knowledge, but also functioned as a political and ideological tool to shape Indonesians into nationalist, revolutionary, and character-based individuals. At that time, the policy curriculum was influenced by anti-imperialism, Indonesian socialism, and ideas about the state and character of development that became the basis for national development. The government aimed to create a generation with national awareness and loyalty to the state through subjects, educational activities, and the formation of national values. During this period, the educational curriculum underwent changes in accordance with the government's political direction, but its primary goal remained the same: helping shape the nation's character and national identity.

Keywords: Education Policy, Curriculum, Soekarno's Government, Nation and Character Building, Nationalism

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kurikulum sebagai alat pembangunan karakter bangsa, penelitian ini menelusuri kebijakan pendidikan pada masa pemerintahan Soekarno pada tahun 1945–1966. Hal ini bertujuan untuk menelusuri perkembangan kebijakan kurikulum pada masa tersebut, memahami landasan ideologis yang mendasarinya, dan menganalisis peran kurikulum dalam membentuk karakter bangsa dan jati diri bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Soekarno, kurikulum pendidikan ditujukan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan kepribadian bangsa sejalan dengan ideologi negara. Pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai alat politik dan ideologi untuk membentuk manusia Indonesia menjadi manusia yang nasionalis, revolusioner, dan berbasis karakter. Pada masa itu, kebijakan kurikulum dipengaruhi oleh anti imperialisme, sosialisme Indonesia, dan gagasan tentang negara dan pembangunan karakter yang menjadi dasar pembangunan nasional. Pemerintah bertujuan untuk menciptakan generasi yang memiliki kesadaran nasional dan loyalitas terhadap negara melalui mata pelajaran, kegiatan pendidikan, dan pembentukan nilai-nilai kebangsaan. Selama periode tersebut, kurikulum pendidikan mengalami perubahan sesuai dengan arah politik pemerintah, namun tujuan utamanya tetap

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

sama membantu membentuk karakter bangsa dan identitas nasional Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Kurikulum, Pemerintahan Soekarno, Pembangunan Karakter Bangsa, Nasionalisme

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan Indonesia diumumkan pada 17 Agustus 1945, pemerintahan mulai berkembang. Deklarasi kemerdekaan adalah momen penting dalam sejarah Indonesia. Dimana Indonesia harus membuat sistem kehidupan nasional dan internasionalnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebelum mencapai kemerdekaan. Salah satunya ialah sistem pendidikan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia untuk seluruh rakyatnya dibangun di antara sistem kehidupan tersebut (Ismail, 2016). Menurut Rifa`I sebagaimana dikutip dalam artikel karya Muhammad Rijal Fadli dan Dyah Kumalasari mengatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita suatu bangsa yang merdeka dan negara yang ingin berdiri sendiri (Rifa'i, 2016). Hal ini sejalan dengan temuan Muhammad Rijal Fadli dan Dyah Kumalasari dalam penelitian mereka tentang Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama Periode 1945-1966 membahas bahwa penyesuaian itu dengan melihat cita-cita bangsa Indonesia, bidang pendidikan mengalami perubahan. Terutama dalam landasan filosofi pendidikan, tujuan pendidikan, sistem pendidikan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Tujuannya supaya semua elemen masyarakat Indonesia dapat merasakan pendidikan dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi (Fadli, 2019).

Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia, melihat pendidikan sebagai alat utama untuk pembangunan karakter bangsa, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila untuk menumbuhkan semangat persatuan dan anti-imperialisme. Salah satu buku karya Tilaar memperkuat argumen ini bahwa pendidikan di era Soekarno memiliki tujuan yang tidak hanya melahirkan individu cerdas secara intelektual tetapi juga membentuk jiwa merdeka. Pendidikan dipandang sebagai alat revolusi kebudayaan yang mempersiapkan rakyat untuk menjadi pelopor pembangunan bangsa (Fadli, 2019). Serta buku karya Hidayatullah yang berjudul Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Bangsa mengatakan bahwa kebijakan pendidikan pada era Soekarno bertumpu pada tiga aspek utama pembangunan karakter, penanaman nilai kebangsaan, dan penguatan kemandirian. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk perlawanan terhadap warisan sistem pendidikan kolonial yang dianggap diskriminatif (Hidayatullah, 2020).

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Gambar 1. Surat Keputusan UU No 19 Tahun 1965

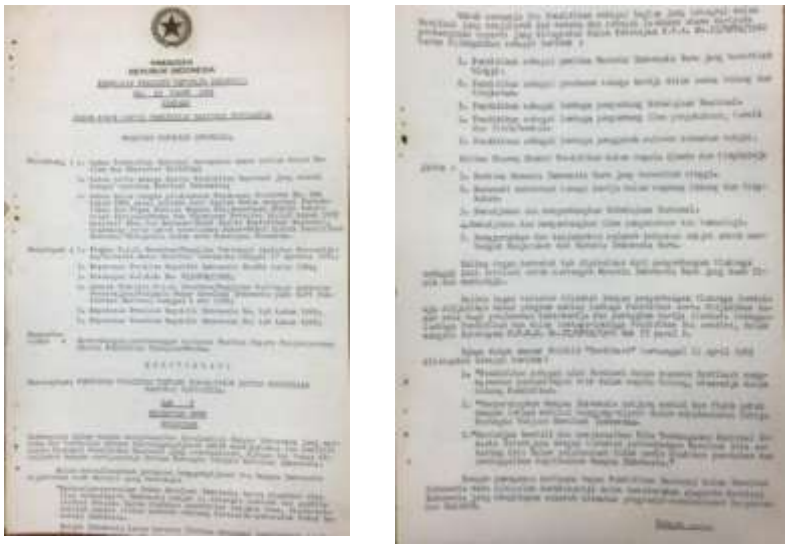

Sumber: Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum (1949-2005) Nomor 4401 A)

Tilaar menyimpulkan secara konstitusional sistem pendidikan dalam era ini didasarkan kepada peraturan diantara lain Undang-Undang pokok pendidikan No. 4 tahun 1950 juncto No. 12 tahun 1954, dan Undang-Undang No. 2 tahun 1962 tentang Perguruan Tinggi Penetapan. Presiden No. 5 tahun 1965 (Tilaar, 1995). Pada 1950 dicetuskan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang disempurnakan (jo) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sejarah pendidikan Indonesia pada masa ini dapat dilihat sesuai dengan pembagian kurun waktu ditandai dengan peristiwa penting dan tonggak Sejarah. Pada 1961 dirumuskan lagi UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, dilanjutkan UU No.14/1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU No. 19/1965 tentang pokok sistem pendidikan nasional pancasila. Masa akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90 % bangsa Indonesia berpendidikan SD (UNY, 2020). Selain itu salah satu masalah utama sistem pendidikan di banyak negara, termasuk Indonesia adalah pendidikan karakter. Penelitian yang dilakukan Nurul Zuriah dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pendidikan karakter telah meningkat karena kesadaran akan pentingnya membentuk generasi yang memiliki nilai moral dan kita harus mampu mempertahankan nilai-nilai budaya dengan pendidikan karakter (Zuriah, 2011).

Beberapa penelitian tentang kebijakan Pendidikan memang telah banyak ditulis seperti penelitian oleh Dep. Penerangan bahwa Soekarno memang tidak secara langsung menyampaikan apa itu pendidikan karakter akan tetapi beliau sudah pernah menyingungnya di tahun 1965 sebagaimana yang ia katakan "..kita masih dihinggapi penyakit individualisme, dan lain-lain sebagainya tak lain tak bukan adalah karna mental

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

investmen kita, persiapan batiniah kita belum kita siapkan dengan sehebat hebatnya…" (Penerangan, 1965). Dari sini dapat dilihat bahwa beliau mengatakan mental investment yang dapat dikatakan juga sebagai pendidikan karakter. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan belum ada penelitian secara khusus mengkaji mengenai kebijakan pendidikan dalam membangun rakyat Indonesia seutuhnya yang berkarakter kuat, sebagaimana dicita-citakan oleh Soekarno. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada pembentukan kebijakan pendidikan dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai pembangunan karakter era Soekarno pada tahun 1945-1966. Demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan penulisan ilmiah dan penguatan pendidikan karakter di Indonesia masa kini.

METODE

Penelitian ini memakai metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah serangkaian pengujian dan analisa kritis sejarah berupa rekaman dan peninggalan masa lalu. Proses ini disebut rekontruksi imajinatif terhadap masa lalu berdasarkan data yang didapatkan melalui serangkaian proses yang disebut historiografi ini terdapat empat tahapan yaitu heuristik (pencarian data). verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran atau penggabungan) dan historiografi (penulisan sejarah) (Gottschalk, 1986). Heuristik adalah tahapan pencarian dan pengumpulan informasi untuk mengetahui semua peristiwa atau peristiwa masa lalu yang relevan dengan penelitian (Laksono.A.D, 2018). Pengumpulan data akan dilakukan melalui pencarian sumber primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian tentang Kebijakan Pendidikan dalam Kurikulum sebagai Pembangunan Karakter Bangsa pada masa Pemerintahan Soekarno 1945–1966. Sumber primer meliputi dokumen resmi seperti Surat Keputusan UU No

19 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Patjasila sumber Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum (1949-2005) Nomor 4401 A) gambar arsip Presiden Soekarno turut membantu memberantas buta huruf di Yogyakarta Sumber IPPHOS 1945-1950 No. IPPHOS/260-No. Album: II. 4-, gambar Gedung Sekolah Madrasah di Sungai Besar, Ketapang pada tahun 1951 Sumber: ANRI, Kempen No. 510917 kk 11, dan gambar terlihat dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, Soekarno mengunjungi Sekolah Rakyat (sekarang SD) di Desa Pangkal Madiun, pada tanggal 21 September 1952 Sumber ANRI Kempen 520921 Hb 2-5. Dalam mencari sumber-sumber primer tersebut peneliti akan mendapatkannya dari Arsip Sekretariat Negara RI di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku, jurnal akademik, serta artikel terkait pendidikan dan pembangunan karakter bangsa: studi kebijakan pendidikan pada era Soekarno dari 1945 sampai 1966. Studi pustaka yang penulis lakukan untuk mencari bahan penelitian yang relevan adalah Aplikasi Ipusnas, Perpustakaan Pusat UNP, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UNP Dan Perpustakaan Labor Sejarah FIS UNP.

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Kritik adalah tahapan atau kegiatan meneliti sumber, informasi, jejak tersebut secara kritis, yang terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal. Pada tahap ini, kritik eksternal dilakukan untuk menguji keaslian material, seperti memverifikasi kredibilitas arsip nasional, misalnya dengan melihat latar belakang dan integritas lembaga seperti ANRI atau Sekretariat Negara RI dalam konteks era Soekarno. Sementara itu, kritik internal bertujuan untuk menguji validitas isi informasi, termasuk menganalisis atau kepentingan dalam dokumen kebijakan endidikan. Hasil analisis sumber primer juga akan dibandingkan dengan sumber sekunder seperti buku sejarah pendidikan untuk memastikan konsistensi informasi (Mulkhan.H, 2016). Interpretasi adalah menafsirkan fakta Sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan berbagai fakta dari dokumen resmi, foto historis, naskah pidato, serta literatur sekunder dengan konteks kebijakan pendidikan era Soekarno 1945-1966, sehingga terungkap peran pendidikan sebagai instrumen utama dalam pembangunan karakter bangsa (Fatimah, 2025). Historiografi adalah penulisan ulang Sejarah atau tahapan kegiatan menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imaginatif masa lampau itu sesuai dengan jejak-jejaknya. Pada tahap akhir ini, peneliti akan menyusun hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis (Haryati, 2017)

PEMBAHASAN

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potesi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Pendidikan yang dilaksanakan sebagai upaya pendewasaan mental, intelektual, dan spiritual, maka dalam kebijakannya, pendidikan harus di-setting sedemikian rupa, sehingga keberadaannya dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Unsur utama dalam kesuksesan pendidikan adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakannya. Pendidikan sebagai amanat negara yang tertuang secara jelas dan lugas dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi fokus aktivitas utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan peradaban bangsa. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Suryawahyuni L. , 2023).

Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya memasuki sebuah babak baru dalam kehidupan bernegara dan sistem kenegaraan. Terpilih sebagai presiden RI yaitu Ir.

Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden, sedangkan dalam melakukan tugas sehari-hari, presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia. Berbagai aspek baru dalam berbagai bidang disusun dengan rapi untuk mencapai sebuah keselarasan bagi seluruh rakyat indonesia yang baru saja merdeka, tak terkecuali dengan bidang pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu pilar penting yang mempengaruhi maju atau tidaknya suatu negara dimasa yang akan datang. Pendidikan dapat menjadi penentu dari pembentukan karakter dan identitas suatu bangsa, dimana pendidikan dapat menjadi alat untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu kepada generasi muda sehingga mereka dapat menjadi

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

individual yang memiliki sifat positif dan cinta kepada tanah air. Dalam buku landasan pendidikan tahun 2011, dijelaskan bahwa pendidikan memiliki pengertian mengenai usaha mempengaruhi, melindungi serta memberikan bantuan yang bertujuan memberikan kedewasaan anak didiknya, atau dengan kata lain membantu anak didik agar cukup mampu dalam melaksanakan tugasnya tanpa bantuan orang lain (Suriasyah, 2011).

Kebijakan Pendidikan pada periode Orde Lama

Kata kebijakan berasal dari bahasa Yunani "Polis" yang berarti kota. Dalam hal ini, kebijakan berkaitan dengan konsep pengaturan organisasi dan merupakan protokol formal yang diterima oleh pemerintah dan lembaga untuk mencapai tujuan mereka dengan mengejar tujuannya (Syafaruddin, 2008). Menurut Tilaar dalam buku Manajemen Pendidikan Nasional bahwa Kebijakan pendidikan adalah proses dan hasil dari perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan masyarakat selama periode waktu tertentu (Tilaar H. , 2008). Sementara menurut Risnawan kebijakan adalah tindakan politik yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembagai maupun intansi pemerintah untuk membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan (Risnawan, 2017). Setiap aspek kehidupan memiliki kebijakan yang digunakan untuk memberi petunjuk dan arah dalam melakukan aktivitas serta membatasi prilaku sehingga lebih jelas dan terarah. Salah satunya diterapkan pada kebijakan pendidikan.

Secara umum, pendidikan orde lama dipraktikkan setelah kemerdekaan pada masa pemerintahan Soekarno, yang memungkinkan akses pendidikan tanpa batas. Pemerintahan berbasis sosialis ini berfungsi sebagai kerangka dasar bagaimana pendidikan dikembangkan dan dikelola untuk pertumbuhan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan (Aisy, 2021). Bangsa Indonesia yang baru saja mengalami Kemerdekaan. dan sedang menjalani pembangunan ekonomi serta pembangunan di sektor-sektor lain yang menunjang laju pertumbuhan ekonomi tersebut memandang kekuatan yang sangat vital bagi proses pembangunan tidak saja di sektor ekonomi tetapi juga di sektor-sektor sosial, kultural dan politik. Dalam hubungan ini pemerintah berusaha mengadakan pembaharuan di bidang pendidikan serta mencoba menemukan suatu sistem pendidikan yang cocok dengan kebutuhan pembangunan.

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Gambar 2. Presiden Soekarno turut membantu memberantas buta huruf di Yogyakarta.



Sumber: IPPHOS 1945-1950 No. IPPHOS/260-No. Album: II. 4-1)

Seperti pada gambar diatas menunjukan Presiden Soekarno turut serta memberantas buta huruf. Dalam hal ini diperkuat oleh argumen Agil Kurniadi selaku sejarahwan bahwa dilihat dari sisi kapabilitas masih banyak masyarakat indonesia yang belum mampu baca, tulis dan hitung. Hal tersebut disebabkan karena minimnya pengetahuan yang diperoleh di sekolah (Agil Kurniadi, wawancara, 20 Mei 2026). Oleh karena itu pembaharuan pendidikan menuntut penilaian kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berlaku dalam menentukan rumusan arah serta tujuan baru dari pendidikan, karena itu kebijaksanaan yang baru harus merupakan prioritas utama yang perlu ditetapkan dan program-program pendidikan perlu dirancang secara matang. Pembaruan di bidang pendidikan dengan sendirinya me-ngundang para pakar di bidang ini untuk ikut berpartisipasi langsung secara aktif baik dalam pelaksanaan maupun dalam penyampaian kritik dan saran bagi perencanaan perubahan selanjutnya, sehingga akan tercapai suatu sistem Pendidikan (Helius H, 1993).

Pendidikan sebagai amanat negara yang tertuang secara jelas dan lugas dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi fokus aktivitas utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan peradaban bangsa. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa selanjutnya, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 termuat komitmen pemerintah berkenaan dengan pendidikan yang berbunyi pendidikan adalah hak setiap rakyat Indonesia. Masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kebutuhan tersebut memerlukan panduan atau pedoman agar penyelenggaraan tidak bertentangan dengan tujuan negara dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga penyelenggaraan pendidikan perlu diatur dalam satu kebijakan untuk memberikan standar atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan (Suryawahyuni L. , 2023). Menurut Rifa`I sebagaimana dikutip dalam artikel karya Muhammad Rijal Fadli dan Dyah Kumalasari mengatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan menyangkut penyesuaian

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita suatu bangsa yang merdeka dan negara yang ingin berdiri sendiri (Fadli, 2019).

Untuk memahami kebijakan pendidikan pada masa pemerintahan Soekarno adalah hasil dari kebijakan pemerintah orde lama yang merupakan pelaksanaan pasal 31 UUD 1945. Sebagai dasar negara, kebijakan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945
2. Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K.J (Agama)Yogyakarta tanggal 2 Desember

   1946
3. UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 1432/Kab. Tanggal 20 Juni 1951 dan Menteri Agama No. K.1/652, tanggal 20 Juni 1951
5. Instruksi Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaan dan Kebudayaan No. 17678/Kab dan Menteri Agama No. K.1/9180 tanggal 16 juli 1951.
6. Undang – undang No. 12 Tahun 1954
7. TAP MPRS No 2 Tahun 1960 (Ismail, 2016).

Kurikulum Pendidikan Nasional sebagai Pembangunan Karakter Bangsa Era Soekarno pada periode 1945-1966

Menurut masyhud kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan Kurikulum merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Kurikulum sangat menentukan proses dan hasil suatu sistem pendidikan. Kurikulum juga bisa berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan semua tingkat Pendidikan (Masyhud, 2014). Pendidikan di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum. Dimulai sejak setelah kemerdekaan hingga yang terbaru. Maka dari itu penulis ingin lebih memfouskan di kurikulum yang pernah digunakan pendidikan di indonesia diantaranya kurikulum 1947 (Rentjana Pelajaran 1947), kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952), dan kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964) diantara lain:

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

1. Kurikulum 1947 (Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947)

Gambar 3. Gedung Sekolah Madrasah di Sungai Besar, Ketapang pada tahun 1951



Sumber: ANRI, Kempen No. 510917 kk 11

Kurikulum 1947, dikenal sebagai Rentjana Pelajaran 1947, merupakan langkah awal usaha pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan untuk membentuk sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini dirancang segera setelah proklamasi kemerdekaan dan meskipun pengimplementasiannya tertunda akibat kondisi revolusi fisik, secara resmi mulai digunakan pada awal 1950-an. Dokumen kurikulum ini sederhana hanya memuat daftar mata pelajaran beserta jumlah jamnya tanpa silabus rinci, sekaligus menjadi simbol bagaimana negara berusaha merdekolonisasi pendidikan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Palupi, 2018).

Kurikulum ini berlandaskan nilai-nilai nasionalisme yang dimaksudkan untuk menyatukan bangsa dengan menggantikan sistem diskriminatif kolonial dengan kurikulum yang menekankan etika, karakter, dan identitas nasional. Tidak seperti pengembangan aspek kognitif secara sistematis, fokus utamanya adalah ranah afektif pendidikan watak, budi pekerti, dan cinta tanah air. Kurikulum 1947 menggunakan model kurikulum terpisah dari segi struktur. Ini berarti mata pelajaran disusun secara terpisah tanpa mengintegrasikan disiplin ilmu (Abdullah, 2017). Pernyataan ini menjadikan siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kelas, mengajukan pertanyaan, berbicara, dan belajar dari pengalaman hidup di luar kelas. Metode ini mengutamakan pembelajaran moral dan sosial.

2. Kurikulum 1952 (Kurikulum Rentjana Pelajaran Terurai 1952)

Kurikulum 1952 merupakan peningkatan besar dari Rentjana Pelajaran 1947. Disebut "Terurai" karena untuk pertama kalinya, setiap mata pelajaran diatur secara menyeluruh dalam silabus lengkap, yang memungkinkan pembelajaran dilakukan dengan cara yang lebih sistematis. Konsep ini didukung secara resmi oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1950, yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1954, sebagai bukti kematangan visi pendidikan nasional.

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Gambar 4. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, Soekarno mengunjungi Sekolah Rakyat (sekarang SD) di Desa Pangkal Madiun, pada tanggal 21 September 1952.



Sumber: ANRI Kempen 520921 Hb 2-5

Terlihat gambar diatas pada tanggal 21 September 1952 Soekarno sedang mengunjungi Sekolah Rakyat (SR) dalam rangka kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perkembangan kurikulum 1952 menandai transisi penting dari model pendidikan karakter menuju sistem pendidikan berbasis keterampilan dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, kurikulum 1952 terdapat kekurangan dalam menjalankan proses pembelajaran yang masih terbatas pada guru dan membutuhkan penguatan untuk menyebarkannya secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Anam, 2024). Hal ini sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan bapak Sumarno (71 tahun) yaitu salah satu masyarakat yg mengalami secara langsung pada periode tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada masa itu hanya sebagian rakyat indonesia yang bisa merasakan program sekolah rakyat (SR) dikarenakan akses sekolah yang terbatas dan tidak menyeluruh kedaerah-daerah terpencil (Sumarno, wawancara, 20 April 2026).

3. Kurikulum 1964 (Kurikulum Rentjana Pendidikan 1964)

Seiring berjalannya waktu adanya perubahan kebijaksanaan dan tujuan pendidikan dari tahun 1959 hingga 1966. Hal ini juga berdampak pada Kurikulum yang ikut berubah sebagai dari akibat perubahan-perubahan tersebut. Dalam bidang pendidikan, hal ini masuk akal karena perubahan kekuasaan atau politik selalu membawa dampak yang demikian (Apple, 1979). Selanjutnya, Keputusan Menteri tentang pendidikan Panca Wardhana dikeluarkan, yang menyebabkan perubahan pada kurikulum yang mencakup bidang keterampilan. Keterampilan diajarkan kepada siswa dari pendidikan dasar hingga menengah atas. Kurikulum sekolah dasar diubah untuk sesuai dengan Panca Wardhana. Ada beberapa mata pelajaran dalam kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan rasa atau karya sesuai dengan Pancawardhana yang ada. Program pendidikan Kemasyarakatan ditambahkan ke SD dan SMP. Dianggap sebagai alat untuk

mengembangkan Pancawardhana pertama, yaitu rasa cinta tanah air, moral nasional dan internasional (Poerbakawatja, 1970). Namun, masih ada kekurangan yang signifikan. Sementara pendekatan dalam kelas guru yang masih dominan aktif dibandingkan dengan siswa, kreativitas dan inisiatif siswa pun masih kurang difasilitasi dengan baik. Sehingga pembelajaran lintas disiplin masih terhambat oleh struktur kurikulum yang terpisah setiap mata pelajaran. Selain itu, kurikulum ini belum diterapkan secara merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil, yang menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan (Helius, 1993).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pendidikan pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1945 sampai 1966 memiliki dampak terhadap identitas dan karakter Indonesia pasca kemerdekaan. Pada kurikulum 1947 (Rentjana Pelajaran 1947), kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952), dan kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964) tidak hanya berfungsi sebagai panduan pengajaran tetapi juga sebagai alat ideologis untuk menanamkan nilai-nilai, patriotisme, persatuan, dan rasa identitas nasional pada siswa. Pada saat itu, pemerintah Indonesia memandang pendidikan sebagai alat strategis untuk mendukung kemajuan dan pembangunan karakter bangsa. Hal ini terlihat jelas dalam kurikulum 1947, 1952 dan 1964 yang menekankan pengembangan bangsa Indonesia dengan identitas nasional, semangat revolusioner, dan fokus pada nilai-nilai nasional. Dalam perkembangannya, keadaan di bidang sosial dan politik juga memengaruhi perubahan kebijakan pendidikan yang diterapkan. Oleh karena itu menghasilkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada penguatan ideologi pemerintah dan mendukung stabilitas nasional. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum dapat berubah dan beradaptasi sesuai dengan dinamika politik dan kebutuhan negara pada saat itu. Namun, tujuan utama pendidikan tetap berpusat pada peningkatan karakter bangsa dan penguatan identitasnya. Sehingga kurikulum politik pada era Soekarno dapat dianggap sebagai bagian penting dari sejarah pendidikan Indonesia karena berperan dalam membangun landasan karakter nasional dan kesadaran nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

ANRI, Kempen No. 510917 kk 11

ANRI Kempen 520921 Hb 2-5

Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum (1949-2005) Nomor 4401 A) IPPHOS 1945-1950 No. IPPHOS/260-No. Album: II. 4-1)

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Buku

Apple, M. (1979). *Ideology And Curriculum.* London: Routledge and Kegan Paul. Fatimah, S. (2025). *Pengantar Ilmu Sejarah.* Depok: Raja Grafindo Persada.

Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Haryati. (2017). *Pengantar Ilmu Sejarah.* Palembang: Universitas Muhammadiyah.

Helius H, K. S. (1993). *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Kemerdekaan 1945-1966.* .

Jakarta: Cv. Manggala Bhakti.

Helius, S. K. (1993). *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Kemerdekaan 1945-1966.* Jakarta: CV. Manggala Bhakti.

Hidayatullah, F. (2020). *Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Bangsa.* Surakarta: Yuma Pustaka.

Laksono.A.D. (2018). *Apa itu Sejarah ; Pengertian, Ruang lingkup, Metode dan penelitian.* .

Pontianak: Derwati Press.

Moestoko, S. (2019). *Pendidikan Indonesia dari jaman ke jaman.* Jakarta: Balai Pustaka. Mulkhan.H. (2016). *Metodologi Sejarah: Teori, Paradigma, dan Aplikasinya.* Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Penerangan, D. (1965). *Perintjian Amanat Tahun Berdikari.* Jakarta: Perpustakaan Nasional. Poerbakawatja, S. (1970). *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka.* Jakarta: Gunung Agung. Rifa'i, M. (2016). *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern.* Yogyakarta:

Ar Ruzz Media.

Suriasyah, A. (2011). *Landasan Pendidikan.* Banjarmasin: COMDES.

Suryawahyuni, L. S. (2023). *Kebijakan Pendidikan.* Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media. Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan.* Jakarta: Rineka cipta.

Tilaar. (1995). *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan.* Jakarta: Gramedia.

Tilaar, H. (2008). *Manajemen Pendidikan Nasional.* Bandung: Remaja Rosdakarya, .

UNY, T. (2020). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia.* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.

Zuriah, N. (2011). *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan* . Jakarta: Bumi Aksara.

Artikel/Jurnal

Abdullah, A. (2017). Ethical Politic and Emergence of Intellectual Class. *Paramita: Historical Studies Journal*, 27(1), 34–49.

Aisy, S. R. (2021). Pendidikan Indonesia Di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama.

Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(2), 569–577.

Anam, M. S. (2024). Memahami Kebijakan Kurikulum Nasional Tahun 1947 dan 1952. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(8), 9313-9317.

Fadli, M. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966).

Agastya: Jurnal sejarah Dan Pembelajarannya, 9(2), 157-171.

Ismail. (2016). Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam). *Kabilah: Journal Of Social Community*, 1(1), 139-169.

Masyhud. (2014). Perubahan kurikulum di indonesia : studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan islam yang ideal. *Raudhah*, 4(1), 49–70.

Nury Batubara, U. A. (2019). Perkembangan Pembelajaran Sejarah Pasca Kemerdekaan-Reformasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(1), 14-34.

Palupi, S. D. (2018). Dinamika Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Pada Tahun 1945-1965.

Journal Student UNY Risalah , 5(5): 25–36.

Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 511-518.

ISSN 1411-1764
e-ISSN 2722-3515
Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Wawancara

Agil Kurniadi. (2026). *Wawancara Mengenai Kondisi Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan.*

Sumarno. (2026). *Wawancara Mengenai Kebijakan Pendidikan Pada Masa Era Soekarno*